

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *good governance*, maka diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah dan membangun kepercayaan publik. Pencapaian hasil kinerja yang dilaksanakan secara maksimal dapat menunjukkan kualitas kinerja pemerintah yang baik. Peran penyusun kinerja pemerintah sangat penting untuk menghasilkan kinerja pemerintah yang berkualitas. Penyusun kinerja instansi pemerintah hendaknya melakukan penerapan sistem pengendalian internal dengan transparan dan mentaati peraturan perundangan yang telah berlaku untuk ditaati pada kinerja instansi pemerintah tersebut (Asmawanti et al., 2020). Kinerja Pemerintah harus diukur untuk mengetahui bagaimana pemerintah melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat

mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Ambarwati, 2021).

Dalam pemerintahan, pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga diperlukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara kinerja yang sebenarnya dan yang diharapkan. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan kinerja instansi pemerintah dan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai pemerintahan yang baik dan terpercaya. Semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Hal ini dikarenakan akuntabilitas menjadi penentu dari keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah adalah rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh, maraknya praktek fraud yang terjadi di berbagai instansi Pemerintah seperti korupsi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang terjadi dalam berbagai bentuk di sektor pemerintahan sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang bersama *Indonesia Corruption Watch (ICW)* telah melakukan pemantauan mengenai trend penindakan kasus korupsi selama empat bulan pertama tahun 2021. Penanganan kasus korupsi oleh aparat

penegak hukum di NTT dalam tahun 2021 caturwulan I (Januari-April), tercatat baru tiga kasus dengan jumlah tersangka sebanyak delapan orang, serta nilai kerugian negara senilai Rp2.753.040.739. Sementara itu, tahun 2020 tercatat 18 kasus korupsi yang melibatkan 55 orang tersangka dengan nilai kerugian negara mencapai Rp1.378.575.559.054. Tahun 2019 tercatat sebanyak delapan kasus korupsi yang melibatkan 21 orang tersangka serta kerugian negara mencapai Rp12.118.091.388. Sedangkan dalam tahun 2018, tercatat 11 kasus korupsi yang melibatkan 24 orang tersangka, serta kerugian negara mencapai Rp7.250.288.518. Dominasi modus kasus korupsi antara lain kegiatan atau proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, penggelapan dan laporan fiktif (sumber: [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)).

Pemerintah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat terutama dalam pelaporan keuangan guna memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pelayanan publik, penerapan transparansi sangat penting untuk menjalankan proses pelayanan yang terbuka sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan jelas. Dengan ketersediaan informasi diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengawasi tindakan pemerintah, serta memperkuat akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Untuk meningkatkan rasa tanggungjawab pejabat publik kepada masyarakat, pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kinerjanya.

Fenomena yang terjadi di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sesuai dengan harapan masyarakat yaitu terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan masih kurangnya prinsip transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kinerja BPKP NTT yaitu melakukan pengawasan. Hal ini diperkuat melalui kinerja instansi BPKP NTT dalam pencapaian anggaran Tahun 2020 yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan BPKP NTT tidak mencapai target. Sebagian besar anggaran BPKP berasal dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2020 menurut Program/Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan	Rp 1.327.971.425	Rp 1.390.320.540	104,70%
2.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Rp 135.646.000	Rp 71.092.000	52,41%
3.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Rp 207.040.000	Rp 155.564.650	75,14%
4.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Rp 188.555.825	Rp 232.252.490	123,17%
5.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Rp 444.362.910	Rp 363.666.219	81,84%

Sumber : [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 jika dilihat pada capaian kinerja program/kegiatan pada instansi BPKP NTT, capaian tertinggi sebesar 123,17% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 232.252.490 pada program/kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan tersebut telah melampaui harapan atau ekspektasi yang telah ditetapkan awalnya. Sedangkan capaian terendah sebesar 52,41% dengan realisasi anggaran Rp 71.092.000 pada program/kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan tersebut tidak mencapai tingkat pencapaian yang diharapkan.

Kurangnya pengawasan selama pelaksanaan proyek atau kegiatan dapat mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak efisien atau penyalahgunaan dana, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan realisasi anggaran yang jauh di bawah anggaran atau sebaliknya melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa adanya hambatan atau kendala dalam implementasi program yang diharapkan tidak tercapai sepenuhnya.

Kelebihan anggaran dalam satu program atau proyek dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya, mengabaikan program lain yang lebih membutuhkan sumber daya tambahan. Hal ini dapat mengganggu pencapaian tujuan dan prioritas yang tepat dalam perencanaan anggaran. Jika anggaran yang direalisasikan jauh di bawah pagu anggaran, ini dapat menghambat kemampuan program atau proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Meskipun program mungkin tercapai, realisasi anggaran yang berlebihan dapat mengindikasikan pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Ini juga dapat mengurangi ketersediaan dana untuk program-program lain. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya penerapan prinsip transparansi keuangan yang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat yaitu masyarakat ingin mengetahui secara pasti tentang penggunaan dana publik dan bentuk pertanggungjawaban dana publik. (Mikael et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli (2018) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati (2021) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan *Accounting Information System* sebagai Pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Apakah Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yakni manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi dan pengawasan serta pengaruhnya terhadap kinerja baik teori maupun dalam praktik.

2. Bagi Instansi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah kedepannya berdasarkan prinsip